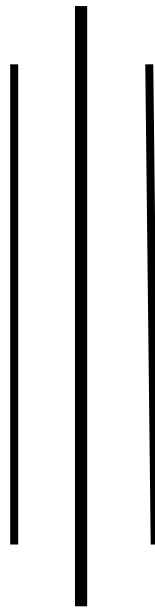




**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia -Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 02 September 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
JF. Perencana Ahli Muda	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem



Waran Sutapa, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.196911021990031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	10
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II	11
2.2 Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol.....	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL.....	21
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol.....	21
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	21
3.3 Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum PD, dan penetapan renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai Perangkat daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana itu dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Karangasem nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 18 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semseta Berencana Tahun 2024 sehingga perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol ini harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomo 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Karangasem 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 20)
19. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 608/HK/2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2024;
2. Untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dalam DPA Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan perubahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi target dan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan.

1.4 Sistematika penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang / pertimbangan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.2 Landasan Hukum

Memuat landasan hukum / peraturan perundang-undangan terkait dengan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dilakukannya perubahan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem

BAB II EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat tentang hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

2.1. Hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem sampai TW II

Memuat capaian sasaran renja tahun 2024, capaian program dan kegiatan renja tahun 2024

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen, berisikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KARANGASEM

3.1. Tujuan dan Sasaran

Memuat penyesuaian tujuan dan sasaran dan indikator kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasen untuk tahun 2024.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan perubahan program dan kegiatan serta perubahannya.

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk:

- a. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan
- c. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator outputnya.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selama tahun 2024 dan perkiraan capaian target tahun 2025.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesbangpol dalam pagu indikatif melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 34 subkegiatan. Dari beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dievaluasi kembali sehingga perlu dilaksanakan perubahan anggaran menyesuaikan dengan situasi saat ini.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol tahun 2024 dan pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 digambarkan sebagaimana tabel 2.1. Dari tabel 2.1 dapat digambarkan target dan realisasi dari Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, yaitu masih adanya perencanaan anggaran yang masih harus diperbaiki sehingga menyebabkan program/kegiatan belum terlaksana sesuai target.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 sampai triwulan II

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.467.395.451	57,60%	2.232.890.077	49,98%
A1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	52.383.024	45,77%	10.938.450	20,88%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	42,86%	8.319.000	35,72%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	60,00%	590.000	49,27%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.659.500	30,00%	0	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	100,00%	1.450.000	75,03%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.400.000	35,00%	0	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.902.612	45,00%	210.000	1,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	60,00%	369.450	36,95%
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.455.537.743	59,99%	1.945.269.293	56,29%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.454.112.743	60,00%	1.945.269.293	56,32%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	40,00%	0	0,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	376.691.676	49,00%	89.421.550	23,74%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	50,00%	1.683.000	44,76%
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.724.500	50,00%	5.912.000	46,46%
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	50,00%	64.950.750	28,40%
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	50,00%	6.259.800	16,25%
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	45,00%	1.986.000	13,24%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	40,00%	630.000	0,90%
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	100,00%	8.000.000	100,00%
A4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.359.284	50,00%	78.356.284	35,56%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	50,00%	9.619.000	38,53%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	50,00%	12.073.284	31,77%
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	50,00%	7.750.000	19,38%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.393.672	50,00%	48.914.000	41,67%
A5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.423.724	50,00%	108.904.500	30,05%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	347.423.724	50,00%	104.904.500	30,19%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	50,00%	4.000.000	26,67%
B	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	30,30%	201.337.387	9,54%
B1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	30,30%	201.337.387	9,54%
23	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	1.021.241.736	26,00%	61.359.000	6,01%
24	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.056.927.000	35,00%	139.978.387	13,24%
25	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	31.920.000	12,00%	0	0,00%
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.794.680.436	99,20%	42.792.497.133	97,71%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
C1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.794.680.436	99,20%	42.792.497.133	97,71%
26	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	43.613.915.636	99,50%	42.791.897.133	98,12%
27	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	56.963.600	30,00%	0	0,00%
28	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	123.801.200	25,00%	600.000	0,48%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
D	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	43,71%	41.960.000	25,02%
D1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksana an Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	43,71%	41.960.000	25,02%
29	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	132.570.000	50,00%	41.960.000	31,65%
30	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawa san Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	35.160.000	20,00%	0	0,00%
E	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	48,00%	139.957.000	35,58%
E1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	48,00%	139.957.000	35,58%
31	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketaha nan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	393.341.636	48,00%	139.957.000	35,58%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU Tahun 2024 (Rp)	Realisasi sd TW II		
					Fisik	Keu (Rp)	Persentase
F	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 Persen	437.742.712	59,55%	117.292.749	26,79%
F1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	437.742.712	59,55%	117.292.749	26,79%
32	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	293.151.612	60,00%	72.840.249	24,85%
33	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	19.644.400	50,00%	3.780.000	19,24%
34	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	124.946.700	60,00%	40.672.500	32,55%
JUMLAH				51.370.978.971	91,84%	45.525.934.346	88,62%

Menyimak realisasi kinerja 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas dan dikomparasikan dengan kinerja OPD, ada beberapa kegiatan yang pengelolaannya belum optimal. Demikian juga terhadap keseluruhan indikator yang diukur dalam aspek akuntabilitas kinerja, rata-rata semua kegiatan sudah terpenuhi. Hanya saja yang harus tetap diperjuangkan adalah aspek kualitas hasil kinerja yang akuntabel. Beberapa faktor yang mempengaruhi aspek pelaksanaan kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Optimalisasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan.
- b. Kualitas sumber daya yang dimiliki.
- c. Perencanaan yang terukur.
- d. Koordinasi lintas unit kerja dan lintas sektoral.

Terhadap pencapaian kinerja baik dari sudut pengelolaan anggaran maupun akuntabilitas kinerja yang dicapai, maka secara langsung berimplikasi terhadap program renstra OPD yang dalam hal ini pencapaian renstra OPD sampai tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. Beberapa kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah; meningkatkan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan yang akuntabel, dan anggaran yang optimal

2.2 Isu – Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kualitas penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut meliputi :

1. Struktur masyarakat adat di Kabupaten Karangasem yang memiliki karakteristik kebersamaan dan gotong royong yang mendukung pengembangan budaya politik
2. Makin berperannya lembaga legislative dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah
4. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat bernegara

kebangsaan

5. Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Makin meningkatnya koordinasi antar instansi pada perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
7. Semakin baiknya kerjasama dan kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat pemuka desa adat dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban
8. Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2024 didasarkan pada indikator Kinerja Keberhasilan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyangkut :

1. Belum maksimalnya partisipasi pemilih pada pemilihan umum.
Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat terlepas dari partisipasi pemilih, partisipasi pemilih akan mempengaruhi tingkat capaian kesuksesan dari pada pemilu tersebut, sehingga peningkatan partisipasi pemilih sangatlah penting dalam pemilu.
2. Masih kurangnya wawasan politik masyarakat.
Wawasan politik pada masyarakat perlu ditingkatkan dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan gambaran pada setiap provinsi di Indonesia baik berada pada tingkat demokrasi baik, sedang maupun buruk, dengan hal tersebut pemerintah pusat atau provinsi/daerah dapat memberikan prioritas pembangunan politik di daerah tersebut.
3. Belum maksimalnya komunikasi pemerintah daerah dengan partai politik.
Sebagai wadah dalam melaksanakan komunikasi maupun koordinasi perlu dibentuk sebuah forum diskusi politik yaitu dalam hal pembahasan pembangunan dan pembanguna politik yang baik di daerah.

4. Belum maksimalnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di daerah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di daerah sangat penting yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah, organisasi kemasyarakatan perlu difasilitasi dan diberikan pembinaan. Disamping itu juga Pemerintah Daerah memiliki peran menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan di daerah, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan melalui fasilitasi kebijakan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan. Pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan wajib dilakukan agar adanya kontroling pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap Ormas guna untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari ormas tersebut, pengawasan yang dilakukan bersifat eksternal.
6. Belum tuntasnya pemahaman terhadap Ideologi Negara dan rasa Nasionalisme yang ditanamkan kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Karangasem .
7. Masih potensialnya konflik Sosial di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesbangpol

Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian sasaran dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Karangasem. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem adalah :

1. Peningkatan pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 bertujuan untuk mengakomodir semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem, diperlukan strategi yang meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Strategi ini adalah sebagai pedoman kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

3.2.2 Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.3 Program dan Kegiatan

Program dapat diartikan sebagai instrumen dari kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini direncanakan ada 6 (enam) program utama dalam pencapaian sasaran peningkatan PAD baik yang berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan PAD maupun yang berpengaruh secara tidak langsung.

Setiap program yang telah direncanakan, dijabarkan lebih teknis kedalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut.

Kegiatan dijelaskan dengan penetapan indikator kinerja yang sifatnya cenderung dengan maksud untuk mempermudah pengukuran dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan. Namun tidak menghindari juga penggunaan indikator kualitatif yang akan dapat mendukung angka dan presentase dari target yang telah ditetapkan karena sifat indikator kualitatif yang kaya informasi sehingga menghidupkan informasi hasil dari suatu kegiatan.

Rencana kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem selalu berpedoman pada prioritas mengingat keterbatasan dana dan sesuai renstra Badan KesbangPol pada Perubahan RKPD tahun 2024. Berdasarkan rencana kerja Badan Kesbangpol dan RKPD Tahun 2024 terdiri dari 6 Program dan 10 kegiatan serta 34 Subkegiatan dirancang dalam RKPD Perubahan menjadi 6 Program dan 11 kegiatan serta 35 Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang terakomodir di Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

A1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

A1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

A1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

A1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

A1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

A3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

A3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

A3.2 Penyediaan peralatan rumah tangga

A3.3 Penyediaan bahan logistik kantor

- A3.4 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- A3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- A3.6 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- A3.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- A4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - A4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- A5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - A5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - A5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - A5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- A6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - A6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - B1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - B1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - B1.2. Pembentukan Paskibraka
 - B1.3. Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila
- C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - C1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - C1.1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

D1.1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.2. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

D1.2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

E1 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

E1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

F1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

F1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

F1.2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

F1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1

Tabel 3.1

Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.467.395.451	Persentase penyediaan dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 Persen	4.858.109.996	390.714.545	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	52.383.024	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	32.417.412	- 19.965.612	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.290.812	-	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.197.600	-	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1.659.500	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1.659.500	-	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.932.500	-	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	2.400.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	2.400.000	-	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.902.612	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	937.000	- 19.965.612	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.455.537.743	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.725.279.000	269.741.257	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.454.112.743	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	29 Orang	3.723.854.000	269.741.257	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.425.000	-	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	376.691.676	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	396.903.076	20.211.400	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.759.800	-	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.724.500	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	12.935.900	211.400	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	228.680.300	-	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.527.076	-	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.000.000	-	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	90.000.000	20.000.000	
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	8.000.000	-	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	102.680.000	102.680.000	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	102.680.000	102.680.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.359.284	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	220.899.284	540.000	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.965.612	-	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	38.000.000	-	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	Jumlah laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	40.000.000	-	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.393.672	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	117.933.672	540.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.423.724	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	379.931.224	17.507.500	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	347.423.724	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinannya	15 Unit	364.931.224	17.507.500	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15.000.000	-	
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	Persentase cakupan pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.805.655.497	695.566.761	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.110.088.736	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	2.805.655.497	695.566.761	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	1.021.241.736	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	1.148.536.136	127.294.400	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70 Orang	1.056.927.000	Jumlah Paskibraka	50 Orang	1.625.199.361	568.272.361	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purna paskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	31.920.000	Jumlah laporan hasil Pembinaan lanjutan kepada Purna paskibraka Duta Pancasila	1 Laporan	31.920.000	-	
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.794.680.436	Persentase cakupan pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 Persen	43.804.956.386	10.275.950	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.794.680.436	Persentase Cakupan Pelaksanaan perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	43.804.956.386	10.275.950	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	43.613.915.636	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	280 Orang	43.722.044.386	108.128.750	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	56.963.600	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Orang	37.860.000	- 19.103.600	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	123.801.200	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	45.052.000	- 78.749.200	
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	Persentase cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	168.118.000	388.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	167.730.000	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	168.118.000	388.000	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	132.570.000	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	157.570.000	25.000.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	35.160.000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	10.548.000	- 24.612.000	
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	Persentase cakupan pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100 Persen	393.341.636	-	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	393.341.636	-	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	393.341.636	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	310 Orang	393.341.636	-	
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	437.742.712	Persentase Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 Persen	1.371.749.712	934.007.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	437.742.712	Persentase Cakupan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	1.371.749.712	934.007.000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran Induk 2024			Anggaran Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Alasan Perubahan
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja	PAGU ANGG (Rp)		
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	293.151.612	Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	798.981.612	505.830.000	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	19.644.400	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	33.948.400	14.304.000	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	124.946.700	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota	1 Dokumen	538.819.700	413.873.000	
JUMLAH				51.370.978.971			53.401.931.227	2.030.952.256	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2024. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem serta kerjasama dan peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Karangasem untuk mencapai kinerja yang optimal.

Amlapura, 02 September 2024

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
JF. Perencana Ahli Muda	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karangasem



I Wayan Sutapa, M.Si
Perencana Utama Muda
Nip. 196911021990031006